

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu upaya untuk melakukan pengembangan terhadap masyarakat yang tidak berdaya. Pemberdayaan masyarakat biasanya dilakukan dengan mengembangkan dan meningkatkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Hal ini dapat dipelajari lebih lanjut tentang pemberdayaan masyarakat dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pada kelompok rentan dan berkembang mulai dari konsep, pengertian, tujuan, fungsi, pengelolaan, dan lain-lain Friedman (1992) mendefinisikan pemberdayaan sebagai “sebuah proses di mana politik diprioritaskan dengan membuat keputusan sendiri untuk melindungi kepentingan masyarakat berdasarkan sumber daya pribadi, partisipasi aktif, prinsip demokrasi, dan pembelajaran sosial melalui pengamatan langsung”

Dalam hal ini pemberdayaan diartikan sebagai pembangunan alternatif. Chambers (1995) mengemukakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan yang mengadopsi paradigma baru yang berpusat pada manusia, melibatkan partisipasi aktif, memberdayakan, dan berkelanjutan.. Menurut Pearson et al (1994: Sukhmanyar, 2007), masyarakat memperoleh informasi, keterampilan, dan kekuasaan yang mereka butuhkan untuk mempengaruhi tidak hanya kehidupan mereka sendiri tetapi juga kehidupan orang-orang yang mereka sayangi. Konsep pemberdayaan dan siklus pemberdayaan tidak dapat dipisahkan. Pemberdayaan pada dasarnya adalah usaha berkelanjutan untuk mendorong masyarakat agar lebih aktif dalam mengambil peran dalam menentukan arah perkembangannya.

Hal ini menunjukkan bahwa program pemberdayaan perlu dilakukan secara berkesinambungan dan ditingkatkan kualitasnya secara bertahap, serta tidak perlu dilaksanakan secara bersiklus dan berakhir pada titik tertentu (Mubarak, 2010)

2.1.2 Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan keterampilan dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program yang disesuaikan dengan kebutuhannya (Handini, Sukesi & Astuti, 2019, hlm.14) Pemberdayaan masyarakat adalah fokus pada membantu dan melayani masyarakat dari berbagai usia melalui berbagai jenis fasilitasi dan dukungan menjelaskan bahwa hal ini memungkinkan Anda untuk merencanakan Memutuskan dan mengambil tindakan untuk memelihara dan mengembangkan tingkat kesejahteraan lingkungan dan sosial. Definisi pemberdayaan masyarakat juga diperdebatkan, yang menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah proses sektor korporasi untuk memperkuat apa yang disebut kemandirian (Lesnussa, 2019, hlm.95) Sepanjang proses tersebut, masyarakat dibantu untuk mengidentifikasi dan menganalisis masalah yang mereka hadapi, diberikan dukungan untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan ditunjukkan bagaimana memanfaatkan sumber daya yang tersedia

Penafsiran tersebut menyatakan bahwa pemberdayaan sebagai suatu proses merupakan serangkaian tindakan yang bertujuan untuk memaksimalkan dan memperkuat pemberdayaan, yang tercermin pada kualitas dan kemampuan yang berkurang dalam persaingan dengan kelompok marginal (Hamid, 2018, hlm10) suatu kelompok dalam masyarakat. Masyarakat yang mencakup manusia setelah mempertimbangkan pendapat para ahli di atas, Pemberdayaan Masyarakat dirancang secara cermat untuk memberikan dukungan, inspirasi, pendidikan, peningkatan, pertumbuhan dan optimalisasi tujuan program untuk meningkatkan kapasitas dan tingkat kemandirian dari para peserta. Pemberdayaan ini dapat diartikan sebagai upaya untuk memberdayakan individu atau kelompok melalui motivasi dan inspirasi, mendorong mereka untuk sadar akan potensi yang dimilikinya dan berusaha mewujudkannya. Selain itu, upaya ini memperkuat potensi masyarakat.

2.1.3 Tujuan dan Fungsi Pemberdayaan Masyarakat

Tentu saja, program yang ditujukan untuk memperkuat masyarakat bukan sekedar tindakan. Mereka juga memiliki tujuan dan peran yang telah ditentukan sebelumnya untuk dipenuhi. Tujuan dan fungsi setiap program pemberdayaan yang dilaksanakan akan berbeda-beda tergantung kebutuhan tujuan dan struktur program. Namun, tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalah untuk memungkinkan anggota masyarakat mengambil keputusan terbaik bagi diri mereka sendiri dan menggunakan seluruh potensi mereka untuk tumbuh dan meningkatkan kualitas lingkungan dan diri mereka sendiri untuk mendorong kemandirian

Hal ini sesuai dengan pernyataan Pak Hamid dalam bukunya "Manajemen Pemberdayaan Masyarakat" (2018). Menurut Hamid (2018), tujuan akhir dari program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah untuk mengedepankan kebebasan masyarakat dalam mengambil keputusan yang terbaik bagi dirinya

Pertama, kekuasaan adalah konsep kunci dalam memahami proses pemberdayaan, dengan mempertimbangkan pandangan tentang kekuasaan seperti yang dibahas oleh Niccolò Machiavelli dalam "The Prince" pada awal abad ke-16, dan Thomas Hobbes dalam "Leviathan" pada pertengahan abad ke-17. Tujuan dari kekuasaan adalah untuk mengontrol partisipasi kelompok dalam proses pengambilan keputusan dengan memperoleh persetujuan pasif terhadap situasi tersebut. Kekuasaan merupakan bagian integral dari interaksi sosial dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan berkelompok. Hal ini selalu menjadi bagian dari hubungan sosial, dan dampaknya dapat dilihat dalam interaksi pada tingkat yang lebih kecil (Sadan, 1997).

Kedua, Talcott Parsons (1991) mengemukakan teori perubahan fungsional yang mirip dengan para pendahulunya. Parsons menggambarkan perubahan sosial dalam masyarakat sebagai pertumbuhan organisme hidup, dengan diferensiasi sebagai elemen kunci dalam pemikirannya. Parsons meyakini bahwa setiap masyarakat terdiri dari berbagai subsistem yang berbeda berdasarkan struktur dan pentingnya fungsi masing-masing terhadap keseluruhan masyarakat. Seiring dengan perubahan sosial, masyarakat umumnya akan berkembang dengan

kemampuan yang lebih baik dalam menghadapi tantangan kehidupan. Pandangan Parsons bisa dikatakan sebagai optimis terhadap proses perubahan.

Ketiga, menurut Lubis dan Husaini (1987), teori organisasi merupakan kumpulan pengetahuan yang secara sistematis mempertimbangkan cara-cara individu bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Ini adalah studi yang mengkaji kerjasama antara individu dalam konteks organisasional. Metode yang digunakan untuk mencapai tujuan menggunakan teori-teori yang dapat menjelaskan sifat kelompok dalam individu dan perilaku individu, terutama motivasinya, dalam proses kolaboratif. Dalam teori ekologi, organisasi dibahas sebagai forum sekelompok orang yang memiliki tujuan yang sama yaitu fokus, jelas, dan berkuasa. Arah organisasi mengacu pada sekelompok orang atau massa yang dibutuhkan kelompok tersebut untuk memiliki kekuatan dan kekuasaan, Kelompok dengan organisasi yang kuat dan berkelanjutan dianggap berdaya

Keempat, Konflik terjadi setiap saat dan terjadi di semua lapisan kehidupan sosial, Dalam interaksi, semua pihak saling bersentuhan dan sering terjadi konflik Belajar dari konflik yang kemudian menimbulkan kerugian bagi para pihak mengarah pada upaya meminimalisir kerugian tersebut Cara untuk mencapai hal ini adalah dengan berupaya memulihkan perdamaian dalam hidup berdampingan. Dalam konteks ini, konflik tidak didefinisikan dari sudut pandang pihak-pihak yang berkonflik, namun ada dalam interaksi sosial. Faktanya, konflik selalu menjadi mesin sosial yang menciptakan dinamisme dalam masyarakat, Ada beberapa pendekatan teoretis untuk menjelaskan konflik Sebagai realitas sosial. Hal ini termasuk pendekatan ketimpangan dalam dunia perekonomian. Pendekatan ini menjelaskan bahwa terjadinya konflik disebabkan oleh adanya ketidakseimbangan antara permintaan dan ketersediaan sehingga menimbulkan kelangkaan Di satu sisi, individu bersifat egois (egois) demi mencapai kepentingan (keuntungan) yang ada “Kesamaan antar individu menciptakan peluang persaingan atas barang dan, sebaliknya, kerjasama antar aktor (Chalid, 2005)”

Kelima, Jasper (2010) menyatakan bahwa gerakan sosial melibatkan interaksi antara individu dan anggota masyarakat. Pendekatan pilihan rasional mengakui hal ini, meskipun versinya menekankan bahwa individu bertindak dengan cara yang lebih realistis daripada abstrak. Pendekatan ini berkaitan dengan pragmatisme, feminisme, dan berbagai tradisi yang mendorong perkembangan studi tentang tindakan individu dan kolektif sejak tahun 1960-an, terutama dalam kajian perlawanan sosial, gerakan sosial, dan aksi kolektif. Ini membantu dalam pengembangan teori-teori yang signifikan di bidang ini.

Keenam, Glasersfeld (1987) menjelaskan konstruktivisme sebagai epistemologi yang berakar dalam filsafat, psikologi, dan sibernetika. Menurut von Glasersfeld, konstruktivisme radikal melibatkan pembentukan konsep-konsep pengetahuan yang terus-menerus. Dia memandang pengetahuan sebagai sesuatu yang secara aktif diterima melalui pikiran dan komunikasi yang efektif, terutama melalui proses konstruksi pengetahuan. Konstruktivisme menganggap bahwa kognisi adalah proses adaptif yang memungkinkan individu mengorganisir pengalaman mereka di dunia, bukan hanya menemukan tujuan di dalam realitas. Secara mendasar, konstruktivisme adalah pandangan yang menekankan aktivitas siswa dalam menciptakan, menafsirkan, dan mengorganisir kembali pengetahuan secara personal (Windschitl & Abbeduto, 2004).

Jim Aife mengungkapkan bahwa konsep pemberdayaan sangat terkait dengan dua konsep utama, yaitu kekuasaan (power) dan ketidaksetaraan (inequality). Oleh karena itu, makna pemberdayaan dapat dipahami melalui berbagai perspektif seperti pluralis, elitisme, strukturalisme, dan poststrukturalisme.

Pertama, perspektif pluralis menganggap pemberdayaan sebagai proses membantu individu dan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat untuk bersaing secara lebih efektif. Dalam perspektif pluralis, pemberdayaan berarti mempelajari bagaimana menggunakan keterampilan untuk mendapatkan perhatian, bagaimana menggunakan media dalam konteks tindakan politik, bagaimana memahami bagaimana sistem (aturan main) bekerja, dan bagaimana melibatkan masyarakat dicapai dengan mendukung. Oleh karena itu,

pemberdayaan dicapai dengan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk bersaing secara adil satu sama lain sehingga tidak ada yang menang atau kalah. Kedua, perspektif elitis memandang pemberdayaan sebagai pemimpin masyarakat, “Kami melihatnya sebagai upaya untuk melakukan pemberdayaan memberdayakan kelompok elit, seperti masyarakat,” dengan menjalin aliansi dengan para pelayan dan orang kaya, atau dengan menghadapi mereka dan mencari perubahan di antara mereka. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan masyarakat agartisak menjadi orang yang tidak berdaya hanya karena kekuasaan dan kontrol kuat yang dilakukan oleh kaum elit. Ketiga, dalam perspektif strukturalitas, pemberdayaan dilakukan dengan memiliki tujuan untuk menghilangkan bentuk dari ketimbangan struktusal. Hal ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat merupakan suatu proses emansipatoris yang dilakukan dengan melibatkan sebuah perubahan besar. Keempat, perspektif poststrukturalis menilai pemberdayaan sebagai upaya mengubah wacana yang lebih menekankan aspek intelektual dibandingkan tindakan dan praktik

2.1.4. Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

(Sanders 1958) dalam (Nasdian 2014 hlm. 35) Prinsip pengembangan masyarakat menggabungkan perspektif keadilan lingkungan dan sosial. Sangat sulit menerapkan suatu prinsip tanpa mengaitkannya dengan prinsip-prinsip lain karena prinsip-prinsip tersebut saling berhubungan dalam penerapannya.

Menurut (Nasdian 2014 hlm. 47) mengutip dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB 1957) dalam laporan tentang konsep dan prinsip pembangunan masyarakat, menjelaskan 8 prinsip yang dianggap berlaku di seluruh dunia. 8 prinsip tersebut yaitu :

- a) Program (proyek), Pertama harus dikembangkan untuk menanggapi kebutuhan masyarakat yang dirasakan, dan kegiatan yang dilakukan harus berhubungan dengan kebutuhan mendasar masyarakat.
- b) Kemajuan lingkungan, Kemajuan Lingkungan dapat dicapai melalui upaya-upaya yang terbagi-bagi di wilayah-wilayah utama, namun

peningkatan masyarakat yang utuh dan disesuaikan memerlukan upaya bersama dan pembentukan proyek-proyek dengan sasaran yang berbeda.

- c) Tahap awal pembangunan, Perubahan sikap masyarakat sama pentingnya dengan kemajuan materi bagi program pembangunan masyarakat.
- d) Hasil pengembangan masyarakat, Pengembangan Masyarakat akan ada tingkat keterlibatan masyarakat yang lebih besar dan lebih baik dalam urusan masyarakat, serta kebangkitan kembali struktur pemerintah daerah yang sudah berfungsi di mana pun kekurangannya. Tujuan mendasar dari setiap program seharusnya adalah identifikasi, dorongan, dan pelatihan para pemimpin lokal.
- e) Program pengembangan masyarakat akan diperkuat, Disajikan secara komprehensif, dan memastikan perluasan jangka panjangnya jika lebih banyak perempuan dan kaum muda berpartisipasi.
- f) Proyek swadaya, Membutuhkan banyak uang dari pemerintah agar berhasil. diperlukan kebijakan yang terkoordinasi dengan baik, pengaturan administratif yang spesifik, perekrutan dan evaluasi praktisi, mobilisasi sumber daya lokal dan nasional, serta organisasi untuk penelitian, percobaan, dan evaluasi agar program pengembangan masyarakat dapat diimplementasikan secara efektif di tingkat nasional.
- g) Pada tingkat lokal, nasional, dan internasional. Program pengembangan masyarakat harus memanfaatkan sepenuhnya sumber daya lembaga swadaya masyarakat.
- h) Kemajuan keuangan dan sosial di tingkat terdekat membutuhkan peningkatan yang sama di tingkat publik.

2.1.5 Manajemen Pengembangan Masyarakat

Pengembangan masyarakat biasanya terjadi dalam beberapa fase, dimulai dengan penumbuhan, pengembangan, kemandirian. Beberapa praktisi berkolaborasi dalam proyek pengembangan masyarakat, termasuk : pekerja sosial, jaringan lingkungan, kantor kontributor dan kaki tangan terkait. Mereka

berkolaborasi selama tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan serta evaluasi program. (Suharto, 1997 hlm. 292-293 dalam Zubaedi, 2013).

Program pengembangan masyarakat sering kali menekankan penerapan manajemen berbasis masyarakat (community-based management, CBM). CBM biasanya menjadi fokus utama dalam program pengembangan masyarakat, yang mengelola program berdasarkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat setempat. Carter mendefinisikan CBM sebagai strategi untuk mencapai pembangunan yang dikelola secara masyarakat, di mana keputusan terkait penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan di suatu wilayah berada di tangan masyarakat di wilayah tersebut (Latama, Gunarto, et al., 2000, hlm. 2, seperti yang dikutip dalam Zubaedi, 2013).

2.1.6 Teori Pemberdayaan Masyarakat

Teori pemberdayaan masyarakat menurut Jim Ife (1997), sebagaimana dijelaskan dalam bukunya "*Community Development, Creating Community Alternatives-Vision, Analysis and Practice*", mendefinisikan pemberdayaan sebagai proses di mana individu atau kelompok masyarakat menyediakan sumber daya untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan mereka dalam menentukan masa depan mereka sendiri. Hal ini dilakukan dengan berpartisipasi aktif dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup di dalam komunitas mereka:

1. Teori Ketergantungan Kekuasaan (*power-dependency*)

Kekuasaan adalah konsep kunci dalam memahami proses pemberdayaan. Konsep kekuasaan telah muncul sejak tulisan-tulisan Niccolò Machiavelli dalam "*The Prince*" pada awal abad ke-16, dan Thomas Hobbes dalam "*Leviathan*" pada pertengahan abad ke-17. Tujuan kekuasaan adalah untuk mengontrol partisipasi kelompok dalam pengambilan keputusan, serta mendapatkan persetujuan pasif dari kelompok tersebut terhadap situasi tertentu. Kekuasaan merupakan bagian integral dari interaksi sosial dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat. Ini selalu menjadi bagian dari hubungan sosial, yang dapat dilihat bahkan pada tingkat interaksi mikro (Sadan, 1997).

2. Teori Sistem (*The Social System*)

Talcott Parsons (1991) mengembangkan teori tentang fungsionalisme dan perubahan sosial. Parsons menggambarkan perubahan sosial dalam masyarakat sebagai pertumbuhan organisme hidup. Konsep utama dalam pemikiran Parsons adalah diferensiasi sebagai proses sentral. Dia juga mengasumsikan bahwa masyarakat terdiri dari sejumlah subsistem yang berfungsi secara fungsional dan dapat mengalami perubahan yang luas. Ketika masyarakat mengalami perubahan, mereka berkembang dengan kemampuan untuk menciptakan peradaban baru.

3. Teori Ekologi (Kelangsungan Organisasi)

Teori organisasi menurut Husaini (1987) mengatakan bahwa adanya sekumpulan ilmu pengetahuan yang selalu membicarakan mekanisme atas kerjasama dua orang atau lebih secara sistematis untuk mencapai sebuah tujuan untuk menjadi sistem yang telah ditentukan. Biasanya kelompok atau individu akan mencapai tujuan dengan cara menggunakan teori yang telah didapatkan sebagai tolak ukur dalam membantu sebuah perubahan. Pada teori ekologi sendiri lebih membahas pada suatu organisasi sebagai wadah untuk sekumpulan masyarakat yang memiliki tujuan agar terarah, jelas dan lebih kuat. Orientasi pada organisasi sendiri juga harus memiliki kelompok yang dapat memiliki kekuatan dan daya. Kelompok yang harus memiliki organisasi yang dengan tujuan dan aturan yang kuat sehingga dapat dijalankan dengan baik.

4. Teori Konflik

Konflik akan selalu muncul dalam segala perkembangan jaman, dan setiap perubahan pada sistem tatanan masyarakat, hal ini sudah menjadi hal lumrah terjadi pada kalangan masyarakat. Belajar dari suatu konflik yang terjadi, bahwa hal ini bisa menjadilandas dalam menghasilkan kerugian dan memunculkan inisiatif serta untuk meminialisirdalam hal kerugian.konflik juga juba menjadi suatu pegangan atau setir dalam melakukan pergaulan yang selalu melahirkan dinamika didalam struktur masyarakat. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya pendekatan ketimpangan dalam dunia ekonomi maupun sosial yang dapat dijelaskan bahwa munculnya konflik dikarekanakan adanya ketidakseimbangan

yang terjadi antara permintaan dan ketersediaan yang menciptakan kelangkaan didalam masyarakat. Selain itu, ada juga sisi egois yang terjadi didalam kalangan masyarakat yang menjadi kerugian maupun keuntungan. Dengan adanya kesamaan diantar individu dapat membuka peluang untuk bisa terjadi perebutan pada suatu komoditi selain itu juga dapat membuka kerjasama yang terjadi antara pelaku dan konsumen (Chalid, 2005).

5. Teori Mobilisasi Sumberdaya

Jasper (2010) mengemukakan bahwa gerakan sosial melibatkan individu-individu dan interaksi antara anggota masyarakat. Pendekatan pilihan rasional mengakui hal ini, meskipun versi mereka menganggap individu sebagai entitas konkret untuk mencapai realisme. Berbagai tradisi seperti pragmatisme, feminisme, dan perkembangan studi tentang aksi individu dan aksi kolektif sejak tahun 1960-an, termasuk penelitian tentang perlawanan sosial, gerakan sosial, dan perilaku kolektif, tumbuh di bawah pengaruh dari teori-teori besar tersebut..

6. Teori Constructivist

Glaserfeld (1987) menjabarkan konstruktivisme sebagai teori pengetahuan yang berakar dalam filsafat, psikologi, dan sibernetika. Von Glaserfeld mendefinisikan konstruktivisme radikal sebagai upaya berkelanjutan untuk membentuk konsep-konsep pengetahuan. Menurutnya, pengetahuan diterima secara aktif melalui pikiran yang sehat atau komunikasi yang efektif, terutama melalui proses konstruksi pengetahuan. Konstruktivisme melihat kognisi sebagai proses adaptif yang memungkinkan individu mengorganisir pengalaman mereka di dunia, bukan hanya untuk menemukan tujuan dalam realitas. Pada dasarnya, konstruktivisme adalah pandangan yang menekankan aktivitas siswa dalam menciptakan, menafsirkan, dan merestrukturisasi pengetahuan secara individu (Windschitl, dalam Abbeduto, 2004).

Jim Ife menyatakan bahwa konsep pemberdayaan erat kaitannya dengan dua konsep utama, yaitu kekuasaan (*power*) dan ketidakberuntungan (*disadvantaged*). Dengan demikian, pemahaman tentang pemberdayaan dapat

diuraikan melalui empat perspektif yang berbeda yaitu : *pluralis*, *elitis*, *strukturalis*, dan *post-strukturalis*.

Menurut Zubaedi (2013: 21-22) dalam bukunya berjudul "Pengembangan Masyarakat", empat perspektif pemberdayaan dapat dijelaskan sebagai berikut. **Pertama**, *perspektif pluralis* menganggap pemberdayaan sebagai proses untuk membantu individu atau kelompok masyarakat yang kurang beruntung agar dapat bersaing lebih efektif. Dalam pandangan *pluralis*, pemberdayaan dilakukan dengan memberikan pendidikan tentang cara mengembangkan keterampilan, menggunakan media yang terkait dengan kegiatan politik, dan memahami bagaimana sistem beroperasi. Dengan demikian, pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat sehingga mereka dapat bersaing secara adil tanpa ada pihak yang menang atau kalah secara mutlak.

Kedua, *perspektif elitis* menganggap pemberdayaan sebagai usaha untuk mempengaruhi kalangan elite, seperti tokoh masyarakat, pejabat, dan orang-orang kaya. Upaya ini dapat dilakukan dengan membentuk aliansi atau melakukan konfrontasi untuk mencoba mempengaruhi perubahan di kalangan mereka. Pendekatan ini diadopsi karena masyarakat sering kali merasa tak berdaya menghadapi kekuasaan dan kontrol yang dimiliki oleh para elite. **Ketiga**, Dalam konteks *perspektif strukturalis* yang dipaparkan oleh Zubaedi (2013: 21-22) dalam bukunya "Pengembangan Masyarakat", pemberdayaan dipandang sebagai agenda perjuangan yang menantang karena bertujuan untuk menghapuskan ketimpangan struktural. Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat merupakan proses pembebasan yang harus disertai dengan perubahan struktural yang mendasar serta penghapusan penindasan struktural. **Keempat**, *Perspektif poststrukturalis* menginterpretasikan pemberdayaan sebagai usaha untuk mengubah diskursus yang lebih menekankan pada aspek intelektualitas daripada aksi atau praksis fisik.

Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat diinterpretasikan sebagai langkah untuk meningkatkan pemahaman terhadap perkembangan pemikiran baru dan analitis.

2.1.7 Teori Proses Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat dalam upaya mencapai tujuan pemberdayaan dapat dicapai melalui penerapan pendekatan yang dikenal dengan Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan, dan Pemeliharaan (Suharto, 1997: 218-219):

- a) **Pemungkinan:** pemberdayaan harus menciptakan kondisi atau lingkungan yang mendukung perkembangan optimal potensi masyarakat, serta menghilangkan hal-hal yang menghambat mereka.
- b) **Penguatan:** pemberdayaan harus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam menyelesaikan masalah dan memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan semua kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat, yang mendukung kemandirian mereka..
- c) **Perlindungan:** pemberdayaan harus melindungi masyarakat, khususnya kelompok-kelompok yang rentan, agar tidak dikuasai oleh kelompok yang lebih kuat. Tujuannya adalah untuk menghindari ketidakseimbangan persaingan antara yang kuat dan yang lemah. Upaya pemberdayaan juga harus mengarah pada penghapusan segala bentuk diskriminasi dan dominasi yang merugikan.
- d) **Penyokongan:** memberikan arahan dan dukungan untuk memungkinkan masyarakat dapat menjalankan peran dan tugas-tugas kehidupan mereka dengan baik.
- e) **Pemeliharaan:** menjaga kondisi yang mendukung agar terjadi keseimbangan dalam distribusi kekuasaan di antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus dapat menjamin harmoni dan keseimbangan yang memungkinkan setiap individu mendapatkan kesempatan untuk berusaha..

Pendekatan 5P adalah metode pemberdayaan yang sesuai untuk digunakan oleh peneliti sebagai panduan dalam menganalisis strategi pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Tasikmalaya. Pendekatan ini mencakup elemen **Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan,** dan

Pemeliharaan, yang sesuai dengan konteks pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Tasikmalaya..

2.1.8 Strategi Pengembangan Masyarakat

Secara umum menurut Moh Ali Aziz (2009, hlm. 8-9). ada empat strategi pengembangan masyarakat yaitu :

- a) *The growth strategy*, Strategi pertumbuhan ini bertujuan untuk mencapai peningkatan ekonomi yang signifikan, meliputi peningkatan pendapatan per kapita penduduk, produktivitas pertanian, akses modal, dan peluang kerja, serta meningkatkan daya beli masyarakat, terutama di daerah pedesaan..
- b) *The welfare strategy*, Strategi kesejahteraan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperkuat pembangunan budaya dan nilai-nilai budaya. Ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah.
- c) *The Responsitive Strategy*, Strategi ini bertujuan untuk merespons kebutuhan yang telah diidentifikasi oleh masyarakat itu sendiri dengan dukungan dari pihak luar, untuk memfasilitasi upaya mandiri melalui pengenalan teknologi dan sumber daya yang relevan untuk memajukan proses pembangunan.
- d) *The Intergrated or Holistic Strategy*, Konsep gabungan dari elemen inti dari strategi di atas merupakan opsi terbaik. Strategi ini menggabungkan secara terstruktur semua komponen dan elemen yang diperlukan untuk mencapai secara bersamaan tujuan-tujuan yang meliputi pertumbuhan berkelanjutan, kesetaraan, kesejahteraan, dan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan komunitas.

2.1.9 Pengertian Usaha Kecil

A. Pengembangan Usaha Kecil

J.S. Badudu (2002), berpendapat bahwa dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, pengertian kata "pengembangan" mengacu pada hal, cara, atau hasil dari proses pengembangan. Menurut KBBI, pengembangan adalah proses atau cara untuk mengembangkan sesuatu, sementara mengembangkan berarti melakukan upaya secara terus-menerus dalam proses pembangunan yang bertahap dan teratur untuk mencapai tujuan yang diinginkan..

Menurut Tunggal dalam (Dani, 2008), pengembangan merupakan upaya yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk meningkatkan kinerja kerja, dengan fokus pada kemampuan meningkatkan respons organisasi terhadap lingkungan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Sementara Moekijat (2010), mengutarakan bahwa pengembangan merujuk pada usaha untuk meningkatkan pelaksanaan pekerjaan saat ini maupun di masa depan, dengan cara memberikan informasi, memengaruhi sikap, atau meningkatkan keterampilan.

Manfaat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) bagi perekonomian nasional termasuk pembukaan lapangan pekerjaan, kontribusi besar terhadap produk domestik bruto, dan menjadi solusi efektif untuk masalah ekonomi di kalangan masyarakat kelas menengah ke bawah. Sementara manfaat UMKM bagi perekonomian daerah meliputi peningkatan pendapatan, pemberdayaan khususnya bagi perempuan, pengalaman berwirausaha, penurunan angka pengangguran di desa, penguatan silaturahmi, pengembangan potensi masyarakat, peningkatan usaha yang telah ada, serta mendorong semangat untuk kemajuan dan faktor lainnya.

B. Kekuatan dan Kelemahan Usaha Kecil

Definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Pasal 1 dari UU tersebut menyebutkan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik individu atau badan usaha individu yang memenuhi kriteria usaha mikro yang diatur dalam UU tersebut. Undang-undang

ini mengidentifikasi beberapa kekuatan potensial UMKM yang menjadi dasar pengembangan di masa mendatang:

- a) Penyediaan lapangan kerja oleh industri kecil memiliki peran yang signifikan dalam menyerap tenaga kerja, dengan perkiraan bahwa mereka dapat menyerap hingga 50% dari tenaga kerja yang tersedia.
- b) Kehadiran usaha kecil dan menengah telah terbukti mendukung peningkatan jumlah wirausaha baru yang bermunculan.
- c) Memiliki pasar usaha yang unik, menerapkan manajemen yang sederhana dan fleksibel terhadap perubahan pasar..
- d) Memanfaatkan sumber daya alam di sekitarnya, industri kecil sebagian besar menggunakan limbah atau hasil sampingan dari industri besar atau industri lainnya.
- e) Industri kecil memiliki potensi untuk pertumbuhan. Upaya pembinaan yang dilakukan menunjukkan hasil yang menunjukkan bahwa industri kecil dapat dikembangkan lebih lanjut dan memiliki kemampuan untuk mengembangkan sektor terkait lainnya.

Menurut Hafsah (2004, hlm. 41), masih terdapat permasalahan atau hambatan yang harus diatasi oleh usaha kecil dan menengah (UKM) agar dapat memanfaatkan potensinya secara maksimal dalam perekonomian nasional, serta dalam menyerap tenaga kerja dan mendistribusikan pembangunan. sama. Masalah-masalah ini sering kali mencakup hal-hal berikut.:

1) Faktor Dalam

- a) Kurangnya permodalan
- b) Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbatas
- c) Melemahnya jaringan usaha dan kemampuan penetrasi pasar

2) Faktor Luar

- a) Iklim usaha belum sepenuhnya kondusif

- b) Terbatasnya sarana dan prasarana usaha
- c) Implikasi otonomi daerah
- d) Implikasi perdagangan bebas

Menurut Ronda Deli (2020 : hlm.45-50) untuk bersaing secara efektif, usaha kecil harus memiliki keunggulan yang dapat mengatasi pesaing, baik dengan menawarkan nilai tambah kepada konsumen melalui harga yang lebih rendah atau manfaat yang lebih besar meskipun dengan harga lebih tinggi. Terdapat empat model identifikasi keunggulan bersaing yang dapat dilakukan oleh pengusaha kecil terhadap pesaing, setidaknya :

- a) ***Diferensiasi produk***, sebuah perusahaan bisa membedakan produknya secara fisik dengan berfokus pada atribut seperti konsistensi, daya tahan, keandalan, atau kemudahan perbaikan.
- b) ***Diferensiasi servis***, selain membedakan produk secara fisik, pengusaha kecil juga dapat membedakan layanan yang menyertainya. Beberapa pengusaha mencapai keunggulan bersaing dengan menawarkan pengiriman yang cepat, nyaman, atau akurat.
- c) ***Diferensiasi personil***, perusahaan dapat mencapai keunggulan kompetitif yang signifikan dengan mempekerjakan dan melatih staf yang lebih baik daripada yang bekerja di perusahaan pesaing. Sebagai hasilnya, pengusaha kecil sering kali membangun reputasi yang sangat baik karena kecerdasan, keramahan, profesionalisme, dan pengetahuan luas karyawan mereka, yang memberikan layanan yang ramah dan antusias kepada pelanggan. Diferensiasi personil ini membutuhkan pengusaha kecil untuk melakukan seleksi ketat terhadap karyawan yang akan berinteraksi langsung dengan pelanggan, serta memberikan pelatihan yang intensif kepada mereka.
- d) ***Diferensiasi citra***, Ketika pesaing menawarkan produk yang serupa, konsumen sering kali membuat perbedaan berdasarkan citra atau merek perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan berupaya untuk membangun citra yang membedakan mereka dari pesaing. Citra perusahaan atau

merek harus mampu menyampaikan manfaat yang unik dan memposisikan produk tersebut dengan tepat. Mengembangkan citra yang kuat dan berbeda memerlukan tingkat kreativitas dan dedikasi yang tinggi dari seorang pengusaha, terutama dalam bisnis kecil.

Salah satu kelemahan yang sering terjadi di kalangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah kurangnya kepercayaan terhadap produk yang dihasilkan, yang kadang-kadang mendorong mereka untuk menggunakan merek asing untuk produk mereka. Meskipun hal ini tidak sepenuhnya merupakan kesalahan para pelaku UMKM, namun konsumen juga berperan dalam menurunkan nilai produk UMKM tersebut. Situasi ini semakin diperparah dengan meningkatnya persaingan dari produk asing yang menawarkan imitasi dengan kualitas yang lebih baik dari produk lokal namun dengan harga yang lebih rendah. Di tengah kondisi seperti ini, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk mendukung produk UMKM dalam negeri, sehingga pelaku UMKM merasa yakin untuk memproduksi dengan menggunakan merek dagang mereka sendiri. Menurut Nikken Syakira, dkk (2023: hlm.498-507) Berikut cara memproduksi UMKM dalam negeri :

1. Melakukan Pemasaran dan Memperkenalkan Produk Diluar Daerah Dengan Memanfaatkan Teknologi.
2. Memperhatikan dan Memenuhi Keinginan Pasar Juga Konsumen.
3. Melakukan Inovasi Pada Produk.

2.1.10 Digital Marketing

a. Pengertian Digital Marketing

Berikut ini adalah pengertian digital marketing menurut beberapa ahli :

- Ridwan Sanjaya & Josua Tarigan (2009) *Digital marketing* adalah kegiatan pemasaran termasuk branding yang menggunakan berbagai

media. Sebagai contoh yaitu blog, website, e-mail, adwords, dan berbagai macam jaringan media sosial.

- Kleindl dan Burrow (2005) *Digital marketing* adalah suatu proses perencanaan dan pelaksanaan dari konsep, ide, harga, promosi dan distribusi. Secara sederhana dapat diartikan sebagai pembangunan dan pemeliharaan hubungan yang saling menguntungkan antara konsumen dan produsen.
- Heidrick & Struggles (2009) *Digital marketing* menggunakan perkembangan dunia digital untuk melakukan periklanan yang tidak digembar-gemborkan secara langsung akan tetapi memiliki efek yang sangat berpengaruh. Bisa kita simpulkan bahwa digital marketing adalah sebuah teknik untuk memasarkan/ mempromosikan jasa, brand atau produk, menggunakan media digital atau internet.

b. Macam-Macam Media Digital

- Televisi
- Handphone
- Videotron
- Radio
- Website
- Social Media
- Marketplace
- E-Mail
- Messenger App
- Dsb.

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan

- a. Penelitian Skripsi. **Nadya Audira, (2018) dengan judul penelitian “Analisis Peranan Pelatihan Program Kampung UKM Digital Terhadap Perkembangan UMKM Dalam Perspektif Islam.** Penelitian ini membahas peran pelatihan program kampung UKM digital yang dilaksanakan oleh mitra UKM Telo Rezewki di Sentra Industri Keripik.

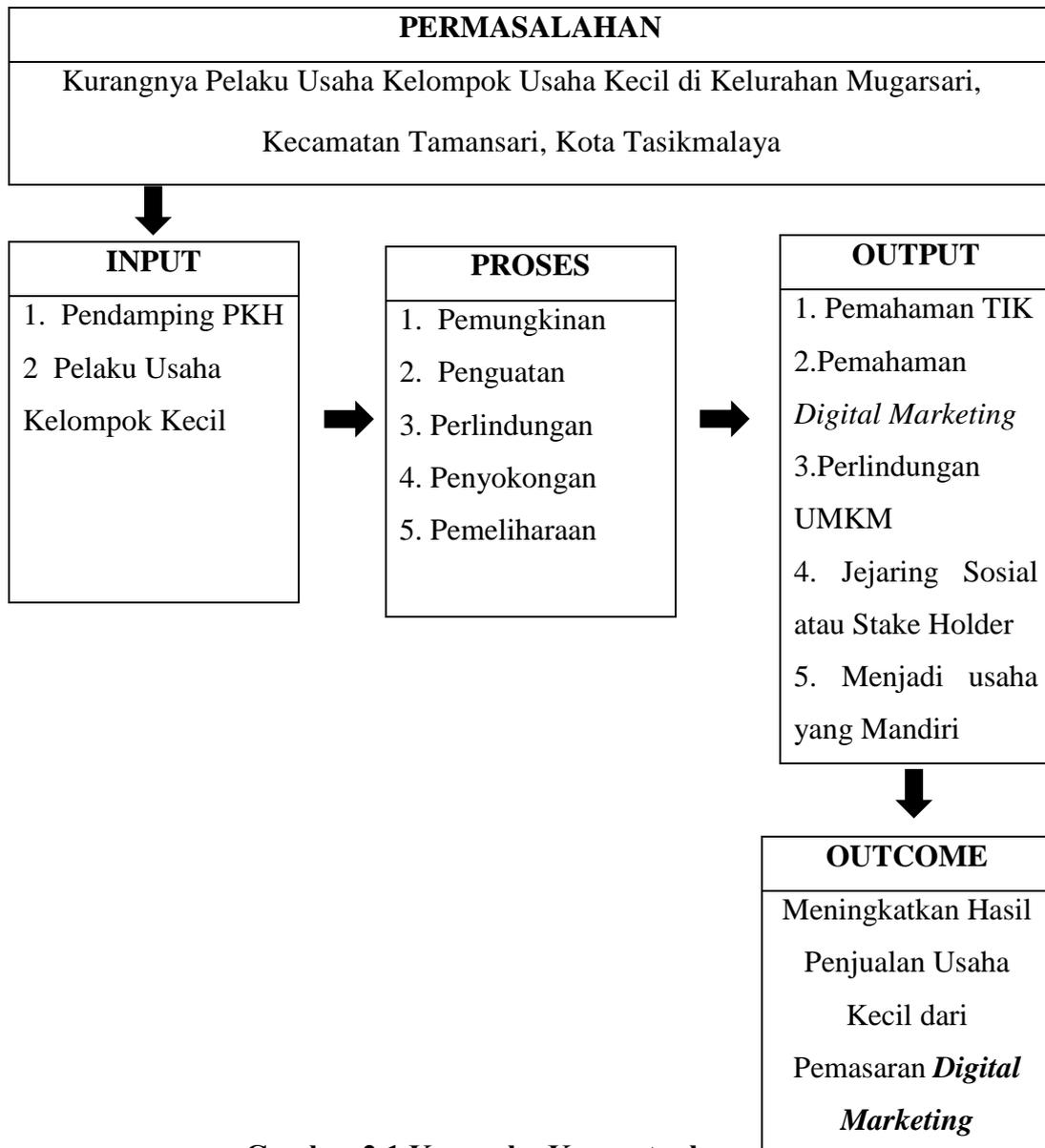
Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan UMKM di Sentra Industri Keripik Kota Bandar Lampung.

- b. Penelitian yang dilakukan oleh **Ni Nyoman Sunariani, dkk (2017) dengan judul “Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Melalui Program Binaan Di Provinsi Bali”**. Penelitian ini dilakukan di Provinsi Bali dan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi UMKM di tingkat hulu, seperti modal usaha (termasuk Kredit Usaha Rakyat), proses produksi, SDM, kekurangan pasokan bahan baku, dan pemasaran. Di tingkat hilir, penelitian ini menemukan kurangnya dukungan dari pemerintah dalam proses pemasaran dan alokasi pemasaran produk UMKM di Pulau Bali, baik secara nasional maupun internasional. Penelitian ini menyoroti upaya pemberdayaan UMKM melalui program binaan yang meliputi aspek hulu hingga hilir, dengan fokus pada permodalan dan pemasaran sebagai faktor kunci yang menentukan prospek UMKM di Provinsi Bali.
- c. Penelitian yang dilakukan oleh **Astuti, dkk (2020) dengan judul penelitian “Pengembangan UMKM Melalui Digitalisasi Teknologi dan Integrasi Akses Permodalan”**. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sindangkasih, Cirebon, dan hasilnya menunjukkan bahwa pelaku UMKM berhasil menghasilkan produk yang sesuai dengan permintaan pasar dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Teknik pemasaran produk UMKM ditingkatkan melalui platform pemasaran online dan offline dengan memanfaatkan teknologi, yang mengakibatkan efisiensi biaya pemasaran. Akses permodalan bagi pelaku UMKM di Desa Sindangkasih juga mengalami peningkatan. Dengan kemudahan ini, produksi yang sebelumnya dalam skala kecil dapat berkembang menjadi usaha yang lebih besar dengan meningkatkan skala produksi.
- d. Penelitian yang dilakukan oleh **Astuti, dkk (2020) dengan judul penelitian “Pengembangan UMKM Melalui Digitalisasi Teknologi dan Integrasi Akses Permodalan”**. Penelitian ini dilakukan di Desa Sindangkasih, Cirebon, dan menunjukkan bahwa pelaku UMKM berhasil

memproduksi produk yang sesuai dengan permintaan pasar dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Peningkatan dalam teknik pemasaran produk UMKM melalui strategi pemasaran online dan offline menggunakan teknologi modern telah mengurangi biaya pemasaran secara signifikan. Akses permodalan bagi pelaku UMKM di Desa Sindangkasih juga mengalami peningkatan. Dengan akses permodalan yang lebih mudah, produksi yang awalnya berskala kecil dapat berkembang menjadi usaha yang lebih besar dengan meningkatkan skala produksinya.

- e. Penelitian Skripsi. **Iqbal Fauzi, (2018) dengan judul penelitian “Strategi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) (Studi Kasus Pada Ud. Genteng Pressuper Soka Masinal Desa Pancasan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas)”** Penelitian ini membahas strategi yang tepat untuk diterapkan oleh perusahaan, seperti memperluas pangsa pasar, mempertahankan kualitas produk, memberikan pelatihan kepada karyawan, dan sebagainya. Tujuan dari strategi ini adalah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pembangunan di masyarakat.

2.3 Kerangka Konseptual



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Gambar 2.1 di atas memberikan penjelasan yang singkat dan jelas mengenai kerangka konseptual yang digunakan oleh peneliti. Dinas Sosial Kota Tasikmalaya memiliki tujuan untuk mengembangkan UMKM di Indonesia guna membantu masyarakat meningkatkan kesejahteraan hidup melalui sektor UMKM.

Permasalahan yang dihadapi adalah kurangnya pelaku usaha kecil di Desa Mugarsari Kecamatan Tamansari.

Program dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kota Tasikmalaya belum berhasil menarik minat yang cukup dari UMKM. Ini terbukti dari rendahnya partisipasi UMKM dalam mengikuti program dan pelatihan yang diinisiasi oleh Program Keluarga Harapan (PKH). Penelitian ini mengidentifikasi PKH sebagai penyelenggara program dan UMKM sebagai target dari program dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial. Proses pemberdayaan masyarakat oleh Dinas Sosial melibatkan lima upaya, yaitu pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyongkongan, dan pemeliharaan.

Hasil dari proses pengembangan UMKM meliputi penguasaan TIK, pemahaman tentang pemasaran digital, perlindungan UMKM, pembentukan jejaring sosial (*stakeholder*), dan transformasi menjadi UMKM yang mandiri. Peningkatan produksi UMKM terjadi setelah mengikuti pelatihan atau program yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kota Tasikmalaya, sehingga UMKM yang tergabung dalam Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dapat meningkatkan hasil penjualan mereka melalui pemasaran digital.. .

2.4 Pertanyaan Penelitian

Untuk mendapatkan hasil dari penelitian ini, data diperlukan sebagai landasan. Untuk mengumpulkan data yang relevan, peneliti mengusulkan pertanyaan, “Bagaimana Proses Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelaku Usaha Kecil dalam Pemanfaatan *Digital Marketing*?”